

Tantangan Pemerintah dalam Menanggulangi Gangster di Perkotaan: Studi Analisis Terhadap Pembinaan Pelajar Muslim yang Terjangkit di Surabaya

Muhammad Shodiq¹, Alisha Azfa Elvirida Zuhri², Anisah Kholifatul Wafiah³, Alaika M. Bagus Kurnia PS⁴

¹ Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, ^{2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, ³ Fakultas Kesehatan, Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya

¹moh.shodiq@uinsa.sch.id, ²alishaazfacantiksekali@gmail.com, ³wafiahanisa@gmail.com,

⁴alaika.ps@ikbis.ac.id

Diterima	12	November	2024
Disetujui	28	Desember	2024
Dipublish	28	Desember	2024

Abstract

Urban gangsters are a complex social phenomenon and a serious problem in many countries, including Indonesia. The existence of gangsters in urban areas causes various negative impacts, such as violence, criminality, and disruption of security and public order. The government has an important role in tackling gangsterism, one of which is through coaching. Coaching aims to reduce the existing crime rate. However, in practice, the government faces various challenges in its coaching efforts, such as weak family supervision and guidance and a lack of platforms to develop their potential. These challenges have an impact on the difficulty of overcoming them in a short time. In addition, post-coaching handling is also crucial. Through in-depth analysis, this journal is expected to provide comprehensive policy recommendations to address the gangster problem in urban areas, with a focus on more effective coaching and post-coaching efforts. By carrying out three problem formulations, namely what is a gangster from the government's perspective, what is the urgency of overcoming gangsters in urban areas from the government's perspective, and what are the government's efforts in finding sustainable solutions to overcome gangsters in urban areas. Qualitative research is an important approach to understand the complexity of urban gangsterism. By understanding the root causes and social context, we can develop more effective and sustainable coping strategies. Gangsterism is a complex social problem that requires an integrated solution. By involving various parties and applying a comprehensive approach, the problem of gangsterism can be overcome and people can live in a safe and peaceful environment. The data collection techniques used in this research are obtaining information from informants through questions and answers or direct meetings between researchers and research subjects (interviews) and also documentation. This journal emphasizes the importance of a multidimensional approach involving the government, the community, and various institutions in overcoming the problem of gangsterism in urban areas. Effective coaching and post-coaching efforts will help reduce the negative impact of gangsterism and create a safer and more harmonious environment for the community.

Keywords: Challenge; Coaching; Gangsters.

Abstrak

Gangster di perkotaan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menjadi masalah serius di

891



banyak negara, termasuk Indonesia. Keberadaan gangster di perkotaan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kekerasan, kriminalitas, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menanggulangi premanisme, salah satunya melalui pembinaan. Pembinaan bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas yang ada. Namun, dalam praktiknya, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pembinaan, seperti lemahnya pengawasan dan bimbingan keluarga serta kurangnya wadah untuk mengembangkan potensi mereka. Tantangan-tantangan tersebut berdampak pada sulitnya mengatasinya dalam waktu singkat. Selain itu, penanganan pasca pembinaan juga menjadi hal yang krusial. Melalui analisis yang mendalam, jurnal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah gangster di perkotaan, dengan fokus pada upaya pembinaan dan penanganan pasca pembinaan yang lebih efektif. Dengan mengungkap tiga rumusan masalah, yaitu apa itu gangster dalam perspektif pemerintah, apa urgensi penanggulangan gangster di perkotaan dalam perspektif pemerintah, dan apa saja upaya pemerintah dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi gangster di perkotaan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang penting untuk memahami kompleksitas gangsterisme di perkotaan. Dengan memahami akar permasalahan dan konteks sosialnya, kita dapat mengembangkan strategi penanggulangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Gangster adalah masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan solusi yang terintegrasi. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan pendekatan yang komprehensif, masalah premanisme dapat diatasi dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan damai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memperoleh informasi dari informan melalui tanya jawab atau pertemuan langsung antara peneliti dengan subjek penelitian (wawancara) dan juga dokumentasi. Jurnal ini menekankan pentingnya pendekatan multidimensional yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga dalam mengatasi permasalahan gangsterisme di perkotaan. Upaya pembinaan dan penanganan pasca pembinaan yang efektif akan membantu mengurangi dampak negatif gangsterisme dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi masyarakat.

Kata kunci: Tantangan; Pemerintah; Gangster.

Pendahuluan

Fenomena gangster di perkotaan merupakan permasalahan kompleks yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Gangsterisme, sebagai sebuah bentuk kekerasan dan kejahatan terorganisir, telah lama menjadi momok bagi banyak kota besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks perkotaan, fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban, tetapi juga menghambat perkembangan dan pembangunan kota.

Gangsterisme sering kali terhubung dengan berbagai bentuk kejahatan serius seperti pemerasan, peredaran narkoba, dan kekerasan. Kelompok-kelompok gangster ini biasanya memiliki struktur organisasi yang rapi dan terencana, serta menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Keberadaan mereka di perkotaan menciptakan

lingkungan yang tidak aman dan penuh ketegangan, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Rasa takut dan kekhawatiran yang timbul dari tindakan gangster ini dapat menurunkan kualitas hidup dan merusak tatanan sosial yang telah dibangun.

Faktor utama yang mendorong munculnya dan berkembangnya geng di perkotaan adalah: Kemiskinan dan Ketimpangan: Kondisi ekonomi yang sulit seringkali menyebabkan individu, terutama generasi muda, bergabung dengan geng untuk mencari pendapatan dan perlindungan. Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama keterlibatan remaja dalam kelompok gangster. Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang memadai dapat mendorong remaja untuk mencari alternatif cepat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dalam konteks ini,



aktivitas kriminal seperti perampokan atau perdagangan narkoba sering dianggap sebagai cara yang efisien untuk memperoleh uang. Ketika alternatif ekonomi yang sah tidak tersedia, keterlibatan dalam aktivitas ilegal menjadi pilihan yang lebih menarik bagi remaja. Kurangnya Pendidikan dan Kesempatan Kerja: Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kesempatan kerja dapat membuat individu merasa putus asa dan mudah terpengaruh oleh seruan untuk bergabung dengan geng. Kesulitan dalam mengakses pendidikan yang memadai dan kesempatan kerja yang layak dapat menyebabkan rasa putus asa di kalangan remaja. Ketika remaja merasa tidak memiliki jalan keluar dari kesulitan ekonomi dan sosial, mereka mungkin melihat jalur kriminal sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi situasi mereka dan mendapatkan relevansi dalam masyarakat. Kenakalan dan keterlibatan dalam aktivitas kriminal sering kali dianggap sebagai jalan keluar dari ketidakberdayaan yang mereka rasakan. Keluarga Bermasalah: Keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan orang tua, dan pola asuh yang buruk dapat menjadi faktor risiko anak terlibat dalam aktivitas kriminal.

Ketidakstabilan dalam struktur keluarga, seperti konflik antara orang tua, perceraian, atau pengabaian emosional, dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap pengaruh kelompok gangster. Dalam situasi ini, remaja mungkin mencari hubungan pengganti di luar keluarga mereka yang dapat memberikan rasa aman dan identitas. Kelompok gangster sering kali berfungsi sebagai "keluarga pengganti," memberikan rasa kepemilikan dan dukungan yang tidak ditemukan di lingkungan keluarga mereka. Lingkungan Miskin: Lingkungan miskin, tingkat kejahatan yang tinggi, dan kehadiran geng-geng lain dapat memperkuat norma-norma antisosial dan mendorong individu untuk bergabung dengan geng. Pengaruh Teman Sebaya: Tekanan teman

sebaya untuk bergabung dengan sebuah geng bisa sangat kuat, terutama di kalangan remaja yang mencari identitas dan pengakuan. Lingkungan teman sebaya memainkan peran signifikan dalam pembentukan perilaku remaja. Remaja sering berusaha membentuk identitas diri dan mendapatkan pengakuan sosial dari kelompok teman mereka. Apabila lingkungan teman sebaya terdiri dari individu yang terlibat dalam perilaku negatif, seperti tawuran atau aktivitas kriminal, maka remaja cenderung terpengaruh untuk mengikuti perilaku tersebut. Pengaruh teman sebaya ini dapat membentuk pandangan dan nilai-nilai remaja terhadap norma-norma sosial dan hukum. **Kekurangan Fasilitas dan Aktivitas Positif:** Ketiadaan fasilitas olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, dan aktivitas positif lainnya dapat menyebabkan rasa bosan dan ketidakpastian di kalangan remaja. Ketika remaja tidak memiliki outlet positif untuk menyalurkan energi dan minat mereka, mereka mungkin beralih ke aktivitas yang kurang konstruktif. Kelompok gangster sering kali menawarkan rasa identitas dan kepemilikan yang memikat bagi remaja yang mencari pengakuan dan tujuan dalam hidup mereka.

Belakangan ini masyarakat di buat resah dengan kemunculan gangster yang menenteng senjata tajam sembari konvoi mengendarai motor di malam hari. Mereka juga tak segan menganiaya warga, menyerang warung kopi, hingga melakukan tawuran antar gangster. Tak hanya itu, mereka juga kerap mengunggah kegiatannya ke media sosial, seolah ingin diakui keberadaannya. kelompok ini muncul sebagai bentuk resistensi atau perlawanan terhadap pranata-pranata normatif di Masyarakat, Cirinya gangster ini selalu melawan aparat penegak hukum, melanggar tata tertib, karena kelompok ini lahir dari sub kultur marginal. Untuk ciri yang lain, mereka juga bertentangan dengan pranata normatif masyarakat. Misalnya, masyarakat melakukan hal yang normal, beristirahat di malam hari,



mereka malah keluar.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, gangster telah menjadi salah satu fenomena yang menimbulkan banyak permasalahan. Mereka bukan hanya sekadar individu yang melakukan kejahatan, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan beragam terhadap masyarakat.

Gangster sering dikaitkan dengan tindakan kriminal yang sangat berbahaya. Mereka terlibat dalam kegiatan seperti penjarahan, perampokan, dan kekerasan jalanan. Hal ini tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat secara keseluruhan. Orang-orang mulai merasa tidak aman, terutama pada malam hari atau di tempat-tempat yang dikenal sebagai zona gangster. Gangsterisme di perkotaan tidak hanya memiliki dampak fisik dan ekonomi yang merugikan, tetapi juga dampak moral yang sangat besar, khususnya terhadap remaja. Kehadiran gangster dalam suatu komunitas dapat mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku remaja dengan cara yang merusak dan membahayakan masa depan mereka.

Salah satu dampak moral yang paling mencolok dari gangsterisme adalah pengaruhnya terhadap perilaku remaja. Gangster sering kali terlibat dalam aktivitas ilegal dan kekerasan, seperti tawuran pelajar, balapan liar, dan perilaku bully. Aktivitas-aktivitas ini, yang sering kali menjadi sorotan dalam berita dan media sosial, dapat menciptakan kesan bahwa perilaku negatif adalah hal yang wajar atau bahkan keren. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima atau bahkan diinginkan dalam masyarakat mereka.

Tawuran pelajar adalah contoh nyata dari dampak gangsterisme terhadap remaja. Kelompok gangster sering kali mendorong atau terlibat dalam konflik antarsekolah atau

antaranggota kelompok, yang dapat menular ke kalangan pelajar. Tawuran yang awalnya dipicu oleh konflik kecil dapat berkembang menjadi perkelahian yang lebih besar dan lebih berbahaya, merugikan banyak orang dan menciptakan lingkungan yang tidak aman di sekolah. Selain itu, tawuran pelajar dapat mengakibatkan trauma psikologis dan fisik pada remaja, yang berdampak negatif pada perkembangan emosional mereka.

Balapan liar, yang sering kali diorganisir atau dipengaruhi oleh kelompok gangster, juga merupakan perilaku berbahaya yang dapat mempengaruhi remaja. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat berisiko dan dapat mengakibatkan kecelakaan serius. Balapan liar sering kali dianggap sebagai bentuk keberanian atau pembuktian diri di mata remaja, tetapi kenyataannya, ini adalah perilaku yang sangat merugikan dan berbahaya. Paparan terhadap perilaku semacam ini dapat membuat remaja merasa bahwa kekerasan dan pelanggaran hukum adalah cara untuk mendapatkan perhatian atau status dalam komunitas mereka.

Perilaku bully yang dilakukan oleh gangster atau dipengaruhi oleh budaya gangster juga memiliki dampak moral yang signifikan. Bullying dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kesehatan mental remaja yang menjadi korban. Mereka yang terlibat dalam bullying sering kali dipandang sebagai pelaku kekuasaan dan dominasi, sementara korban mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan pribadi dan akademis remaja, serta mempengaruhi hubungan sosial mereka.

Dampak moral ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menyebabkan kemerosotan moral dalam masyarakat secara keseluruhan. Ketika perilaku negatif dianggap sebagai hal yang normal atau bahkan diidolakan, nilai-nilai positif seperti integritas,



empati, dan tanggung jawab dapat tergerus. Remaja yang terpapar pada perilaku gangster cenderung kehilangan arah dan tujuan hidup yang positif, karena mereka tidak memiliki model peran yang baik atau tujuan hidup yang jelas.

Peran pemerintah dalam menghadapi masalah gengster sangatlah penting. Dengan menerapkan strategi yang komprehensif, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua warga. Strategi ini meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga masyarakat, organisasi sosial, dan masyarakat umum, untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Dalam hal pencegahan Pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan akses pendidikan dan peluang ekonomi bagi kaum muda, terutama di daerah rawan gengsterisme. Hal ini dapat membantu mengurangi faktor-faktor pendorong seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan. Pemerintah juga perlu memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh gengster. Hal ini dapat memberikan efek jera dan mengurangi aktivitas gengsterisme. Penanganan gangsterisme memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, terutama dalam hal rehabilitasi bagi anggota geng yang ingin keluar dari kelompok mereka. Program rehabilitasi yang efektif dapat menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi masalah ini dan membantu mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari gangsterisme.

Program rehabilitasi untuk anggota gangster yang ingin meninggalkan kelompok mereka harus dirancang dengan cermat untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu dan membantu mereka memulai kehidupan baru yang produktif. Program ini bisa meliputi berbagai komponen, seperti pelatihan

keterampilan, konseling psikologis, dan dukungan sosial. Pelatihan keterampilan penting untuk membantu mantan anggota geng memperoleh keahlian baru yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha mereka sendiri. Dengan keterampilan yang relevan dan diterima di pasar kerja, mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

Konseling psikologis juga merupakan aspek kunci dari rehabilitasi. Banyak anggota geng yang terlibat dalam aktivitas kriminal mungkin mengalami trauma atau masalah kesehatan mental akibat pengalaman mereka. Program rehabilitasi perlu menyediakan dukungan psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma tersebut dan mengembangkan strategi coping yang sehat. Ini juga dapat membantu mereka membangun kembali hubungan sosial yang sehat dan memulihkan kepercayaan diri.

Dukungan sosial dari komunitas juga sangat penting dalam proses rehabilitasi. Keterlibatan keluarga, teman, dan masyarakat dapat memberikan motivasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu mantan anggota geng menjalani proses perubahan. Masyarakat yang mendukung dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan bagi individu untuk membuktikan diri mereka.

Selain rehabilitasi individu, upaya pemulihan juga perlu mencakup program pemberdayaan masyarakat di daerah rawan gangsterisme. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja, yang semuanya dapat membantu mengurangi daya tarik gangsterisme bagi individu, terutama remaja. Pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan berbagai inisiatif, seperti pendidikan dan pelatihan kerja, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan akses ke layanan sosial.



Program pemberdayaan masyarakat yang efektif dapat memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi individu di daerah rawan gangsterisme. Dengan menyediakan akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja, masyarakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketika masyarakat memiliki akses ke peluang yang lebih baik, mereka lebih cenderung untuk menjauh dari aktivitas ilegal dan fokus pada pengembangan diri dan komunitas.

Selain itu, pengembangan ekonomi lokal, seperti dukungan untuk usaha kecil dan menengah, juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian lokal. Program-program ini dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman.

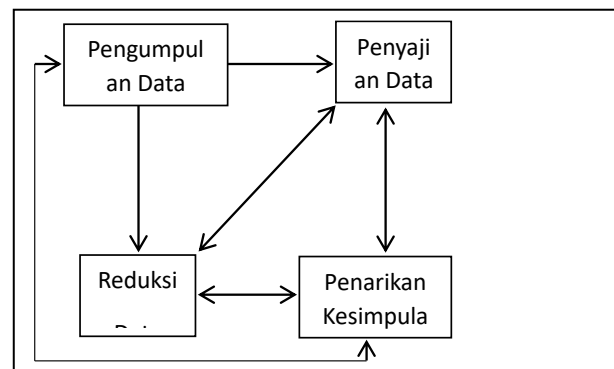
Secara keseluruhan, penanganan gangsterisme memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan holistik, yang mencakup rehabilitasi individu dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menyediakan dukungan yang tepat untuk mantan anggota geng dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat membantu mengurangi dampak negatif gangsterisme dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan stabil.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. (Moleong, 2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini melibatkan pemanfaatan berbagai metode ilmiah dan

dilakukan pada suatu kondisi yang alamiah. Metode ini sebelumnya telah diterapkan dalam penelitian sejarah budaya dan sering disebut sebagai metode teknis karena efisiensinya dalam pengumpulan dan analisis data. Lokasi penelitian dilakukan di Pos Lantas Kota Surabaya Utara dengan pertimbangan bahwa Dinas Pengamanan memiliki peran sebagai pelaksana yang turun tangan langsung untuk kasus gangster ini.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dkk. (2014) yang mengemukakan metode analisis data yang melibatkan beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut meliputi pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.



kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Pemerintah Terkait Gangster di Perkotaan

Belakangan ini aksi anak – anak muda yang dilabeli kelompok gangster makin meresahkan warga kota Surabaya. Terkait fenomena gangster ini, Muhammad Husni dari Tim Jati Suro Pos Pengamanan Dupa Demak Satpol Kota memberikan komentarnya. Menurutny



Gangster adalah kelompok anak muda yang marjinal di dalam kota, mereka tergabung dalam jumlah banyak dan meresahkan warga karena aksinya yang menyebabkan kerusuhan dan mengancam keamanan.

Saat ini, keberadaan gangster telah menjadi masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Kelompok-kelompok remaja ini, yang sering kali memiliki ciri khas tertentu, dikenal karena perilaku kekerasan. Fenomena kekerasan gangster bersifat global dan terjadi di negara-negara dengan pendapatan tinggi maupun rendah. Walaupun bukan isu yang baru, kekerasan yang dilakukan oleh gangster tetap menjadi ancaman serius bagi keamanan publik. Dalam dunia gangster, kekerasan dianggap sebagai bagian normal dari interaksi sosial mereka, termasuk dalam berbagai tindakan kriminal. Kekerasan ini bisa terjadi antara gangster dan individu di luar kelompok, maupun di dalam atau antar gangster itu sendiri. Biasanya, kekerasan digunakan sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi, memperluas wilayah, merekrut anggota baru, mencegah pembelotan, menyingkirkan anggota yang tidak diinginkan, membalas dendam, serta untuk meraih penghormatan dan dominasi terhadap orang lain.¹

Melalui tayangan televisi kita dapat menyimak mereka menjalankan aksi brutal di jalanan mereka juga digambarkan sebagai kaum remaja yang sering membuat keributan dan sudah dicap negative oleh kalangan masyarakat umum. Para anggota geng ini sering dikenal dengan sebutan (GANGSTER). Dalam bahasa psikoanalisis Sigmund Freud (1990-1997), kaum remaja itu lebih mengikuti kekuatan (dorongan-dorongan agresif) ketimbang superego (hati nurani). Kebendaan ego

(keakuan) mereka gagal untuk memediasi agresivitas menjadi aktifitas sosial yang dapat diterima dengan baik dalam kehidupan sosial (sublimas). Namun, pendekatan psikologis itu sekedar mampu mengungkap isi dalam lingkup individual itu berarti nilai-nilai etis yang berdimensi sosial cenderung untuk dihilangkan, Padahal kehadiran geng motor lebih banyak berkaitan dengan problem sosiologis. Gengster sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi lingkungan sosial yang buruk. Banyak anggota geng berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, di mana mereka mencari identitas dan rasa memiliki dalam kelompok.²

Perasaan khawatir bahwa geng ini akan merebak atau menular layaknya bahaya patologis pun dapat dimengerti. Sebab, apa yang disebut sebagai kanakalan remaja tidak dapat lahir sendiri. Kenakalan atau penyimpangan sosial remaja, yang terlibat dengan bertumbuhnya geng, ditransmisikan dan dipelajari dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Terlebih lagi remaja sangat rentan untuk melakukan tindakan-tindakan peniruan, apalagi terhadap perilaku yang dianggap sebagai mode (fashion) yang menimbulkan berosisme dan rasa bangga.

Keberadaan gengster di Surabaya, jika dibiarkan, akan menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tindakan kekerasan, intimidasi, dan perusakan yang seringkali dilakukan oleh gengster dapat menciptakan suasana yang mencekam dan tidak kondusif bagi kehidupan masyarakat. Konflik antar geng juga berpotensi menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta merusak tatanan sosial di lingkungan sekitar. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan

¹ Puji Ayu Astuti, Ismah Rustam, and Ahmad Mubarak Munir, "Analisis Kekerasan Gangster Di Haiti Dan Dampaknya Terhadap Arus Migrasi Menuju Amerika Serikat Tahun 2019-2021," *Indonesian Journal of Global Discourse* 4, no. 2 (2022): 53–72.

² Ilham, "KEKERASAN DAN KRIMINALITAS DI PERKOTAAN: ANOMALI KOTA MAKASSAR MODERN PADA ABAD KE-20," *971-1216* 14, no. 2 (1963): 31–46.



masyarakat Surabaya untuk hidup dalam lingkungan yang aman, damai, dan tertib. Untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi Masyarakat. Perlu adanya tindakan tegas dari pihak berwajib untuk memberantas aktivitas gengster di Surabaya. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, umumnya memandang keberadaan gengster di perkotaan sebagai ancaman serius terhadap keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas sosial. Selain itu, aktivitas gengster dapat memengaruhi citra dan kredibilitas pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum dan keamanan publik.

Keberadaan gengster di perkotaan sering kali digunakan oleh lawan politik untuk menyerang kebijakan pemerintah yang dianggap kurang efektif dalam menangani masalah kriminalitas. Di satu sisi, isu gengster dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menunjukkan kelemahan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan aparat keamanan, serta menciptakan keresahan sosial yang berdampak negatif bagi stabilitas politik. Pemerintah yang dianggap tidak tegas dalam menangani gengster bisa kehilangan dukungan publik, terutama di masa pemilu atau dalam situasi politik yang tidak stabil.

Selain itu, masalah gengster juga bisa dimanfaatkan oleh elit politik untuk meraih dukungan dengan menawarkan solusi yang tegas terhadap kejahatan jalanan ini. Dalam konteks ini, politisi sering kali menggunakan pendekatan populis dengan menyuarakan perlunya kebijakan yang lebih keras, seperti operasi penertiban besar-besaran atau peningkatan anggaran keamanan. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga dapat menggunakan pendekatan represif untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan hukum, meskipun tindakan tersebut berisiko memunculkan masalah hak asasi manusia jika tidak dilakukan secara proporsional.

Di sisi lain, penanganan yang tepat terhadap gengster bisa meningkatkan citra politik pemerintah di mata publik. Ketika pemerintah mampu menunjukkan keberhasilan dalam menekan aktivitas gengster dan mengembalikan rasa aman di masyarakat, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan dan penegakan hukum. Upaya ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga membangun stabilitas sosial yang penting untuk keberlangsungan kebijakan pembangunan ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Namun, dalam upaya memberantas gengster, terdapat tantangan politik yang harus dihadapi, seperti potensi konflik kepentingan antara kelompok-kelompok politik tertentu yang mungkin memiliki hubungan dengan organisasi kejahatan. Dalam beberapa kasus, gengster memiliki koneksi dengan tokoh-tokoh politik lokal yang memanfaatkan mereka sebagai alat untuk menekan lawan politik atau menjaga kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan integritas yang tinggi dari pihak berwajib dan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pemberantasan gengster tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

Selain pendekatan represif, pemberantasan gengster juga harus disertai dengan kebijakan yang bersifat preventif dan kesejahteraan sosial. Pemerintah pusat maupun daerah perlu mengintegrasikan program-program yang menasar akar masalah kriminalitas, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan. Investasi dalam program-program sosial ini tidak hanya dapat mengurangi potensi keterlibatan generasi muda dalam aktivitas kriminal, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial-politik secara keseluruhan.

Dengan demikian, penanganan masalah gengster tidak hanya membutuhkan tindakan tegas dari pihak berwajib, tetapi juga koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,



kebijakan yang integratif, serta dukungan politik yang kuat untuk memberantas kejahatan dan menjaga stabilitas politik di Surabaya dan wilayah perkotaan lainnya. Beberapa pandangan umum pemerintah mengenai gengsterisme antara lain: Ancaman terhadap keamanan, Gengster seringkali terlibat dalam berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak aman dan khawatir akan keselamatan diri dan harta benda mereka. Keberadaan gengster menciptakan rasa takut yang meluas di masyarakat, menyebabkan terganggunya kehidupan sehari-hari serta memburuknya hubungan antarwarga karena ketidakpercayaan dan ketidakpastian. Kejahatan yang berulang juga dapat memecah solidaritas komunitas dan meningkatkan isolasi sosial, terutama di wilayah-wilayah yang sering dilanda konflik. Selain itu, aktivitas gengster berdampak besar pada stabilitas ekonomi. Usaha kecil dan menengah sering menjadi target pencurian dan pemerasan, yang menyebabkan kerugian finansial. Daerah yang tidak aman juga sulit menarik investasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk pengangguran serta kemiskinan. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak aman dan khawatir akan keselamatan diri dan harta benda mereka. Gangguan ketertiban umum: Aktivitas gengster seperti tawuran, vandalisme, dan penggunaan senjata tajam dapat mengganggu ketertiban umum dan menciptakan keonaran di lingkungan masyarakat. Tindakan seperti itu akan mengalami penurunan kualitas hidup secara drastis. Lingkungan yang biasanya tenang dan kondusif berubah menjadi tidak aman, yang berimbas pada perasaan tidak nyaman dan cemas di kalangan penduduknya. Anak-anak dan remaja, khususnya, menjadi kelompok yang rentan terpapar dampak negatif ini. Mereka mungkin terlibat dalam kekerasan,

berpartisipasi dalam kegiatan geng, atau menjadi korban kejahatan.

Selain itu, gengster kerap menciptakan keonaran di lingkungan sekitar, menyebabkan kerusakan fasilitas umum, dan mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Tawuran massal, misalnya, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang terlibat, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Sekolah-sekolah dan tempat ibadah seringkali terpaksa ditutup atau dihentikan sementara saat terjadi bentrokan, menyebabkan gangguan pada akses pendidikan dan kegiatan keagamaan.

Dari perspektif sosial yang lebih luas, gengster dapat merusak struktur sosial masyarakat. Mereka sering kali merekrut pemuda yang rentan dan putus asa, yang kemudian terjerumus dalam dunia kejahatan. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya angka kriminalitas dan hilangnya generasi muda yang seharusnya berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat. Selain itu, hubungan antar warga menjadi terganggu, karena ketidakpercayaan dan rasa takut yang terus berkembang di dalam komunitas tersebut.

Orang-orang yang hidup di lingkungan penuh kriminalitas sering mengalami trauma, ketakutan berlebihan, dan bahkan depresi. Anak-anak dan remaja yang tumbuh di wilayah ini juga berisiko mengalami gangguan perkembangan psikologis dan lebih rentan terlibat dalam kegiatan kriminal di masa depan. Hambatan pembangunan: Keberadaan gengster dapat menghambat proses pembangunan dan investasi di suatu daerah. Investor akan enggan menanamkan modal di daerah yang dianggap tidak aman. Pelanggaran hukum: Kegiatan gengster jelas melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menindak tegas segala bentuk aktivitas gengsterisme., (2008). Faktor utama terbentuknya gangster di perkotaan menurut Perbedaan Generasi dan



Pengaruh Teknologi. Memang benar bahwa anak muda di masa lalu dan sekarang memiliki kesamaan dalam hal mencari identitas dan kelompok. Namun, cara mereka mengekspresikan diri dan membangun komunitas sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. "Jika dulu mereka mungkin lebih sering berkumpul secara langsung, kini media sosial seperti Instagram menjadi platform utama untuk berinteraksi, memamerkan diri, dan mencari pengakuan." Ujar satpol PP. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu motif utama pembentukan geng saat ini adalah untuk mendapatkan pengakuan. Mereka ingin merasa diakui sebagai bagian dari kelompok yang kuat, populer, atau bahkan ditakuti. Perubahan ini mencerminkan transformasi besar dalam budaya komunikasi dan pembentukan identitas. Sebelumnya, interaksi sosial dilakukan secara langsung, di mana hubungan antarindividu dibangun melalui pertemuan tatap muka dan pengalaman bersama. Kini, media sosial seperti Instagram memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui layar, menciptakan sebuah budaya digital di mana komunikasi dan pengakuan lebih sering terjadi secara virtual. Penggunaan media sosial telah memunculkan budaya baru di mana pentingnya pengakuan dan status sosial sering diukur dari jumlah "likes", komentar, dan pengikut. Ini menciptakan tekanan untuk selalu tampil sempurna di hadapan audiens yang lebih luas, yang dapat memengaruhi cara orang memandang diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Budaya pamer di media sosial dapat memengaruhi nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan menekankan pada penampilan dan gaya hidup sebagai ukuran keberhasilan dan popularitas.

Dalam konteks pendidikan, media sosial menawarkan peluang untuk memperluas akses dan penyebaran informasi. Platform seperti Instagram dapat digunakan untuk

menyebarkan materi pendidikan, memfasilitasi diskusi, dan membangun komunitas belajar yang lebih luas. Ini menciptakan kesempatan untuk pembelajaran informal dan akses ke sumber daya yang mungkin tidak tersedia dalam konteks pendidikan tradisional. Namun, keberadaan media sosial juga menghadirkan tantangan, seperti potensi gangguan yang dapat memengaruhi fokus siswa dan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat. Ini memerlukan pendekatan yang lebih kritis dalam menggunakan media sosial sebagai alat pendidikan, serta meningkatkan literasi media dan keterampilan berpikir kritis untuk membantu individu memilah informasi dengan bijak. Dinamika Geng dan Konflik : Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, anggota geng seringkali menciptakan situasi yang dramatis atau kontroversial. Misalnya, mereka memprovokasi geng lain, melakukan tindakan vandalisme, atau menyebarkan rumor. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian, meningkatkan popularitas geng, dan memperkuat ikatan solidaritas antar anggota.

Faktor Kenakalan Remaja Berdasarkan perkembangan zaman saat ini adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab kenakalan remaja saat ini adalah : (a) Faktor intern adalah faktor yang datangnya dari dalam tubuh remaja sendiri. Faktor intern ini jika mendapatkan contoh-contoh yang kurang mendidik dari tayangan televisi akan menimbulkan niat remaja untuk meniru adegan-adegan yang disaksikan pada isi program televisi tersebut. Khususnya menyangkut masalah pergaulan remaja di zaman sekarang yang makin berani mengedepankan nilai-nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan adat budaya bangsa. Akhirnya keinginan meniru tersebut dilakukan hanya sekedar rasa iseng untuk mencari sensasi dalam lingkungan pergaulan dimana mereka bergaul tanpa batas dan norma agar dipandang oleh teman-temannya dan masyarakat sebagai remaja yang gaul dan tidak ketinggalan zaman.



(b) Faktor ekstern Faktor ekstern adalah faktor yang datangnya dari luar tubuh remaja. Faktor ini dapat disebut sebagai faktor lingkungan yang memberikan contoh atau teladan negatif serta didukung pula oleh lingkungan yang memberikan kesempatan. Pengendalian Dalam literatur sosiologi (Paul B Horton dan Chester L Hunt, 1964: 140-146, dan Alex Thio, 1989: 176-182).³

Terdapat data atau laporan terkait perkembangan gangster di perkotaan dari beberapa sumber yang dapat memberikan gambaran umum tentang perkembangan gengsterisme, mulai dari laporan kepolisian: Laporan kepolisian tentang kejahatan yang terkait dengan geng dapat memberikan indikasi tentang aktivitas gengster di suatu wilayah. Survei Kriminalitas: Survei kriminalitas yang dilakukan oleh lembaga penelitian dapat memberikan data tentang persepsi masyarakat terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan oleh gengster. Studi Akademik: Penelitian akademis tentang gengsterisme dapat memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gengsterisme dan dampaknya terhadap masyarakat. Laporan Media Massa: Media massa seringkali meliput peristiwa yang melibatkan gengster. Meskipun tidak selalu akurat, laporan media dapat memberikan gambaran umum tentang tren dan masalah yang terkait dengan gengsterisme.

Urgensi Penanggulangan Gangster dalam perspektif pemerintah

Urgensi penanggulangan gangster di perkotaan semakin mendesak, terutama terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan fenomena gangster

yang sering kali melibatkan remaja dan menimbulkan keresahan di berbagai kota di Indonesia, termasuk Surabaya. Aksi-aksi mereka, seperti konvoi kendaraan bermotor dan penggunaan senjata tajam, tidak hanya mengancam keselamatan publik tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Fenomena ini sering kali dipicu oleh kurangnya pendidikan moral, pencarian identitas, serta kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung, seperti kemiskinan dan pengangguran seperti yang diungkapkan oleh Hurwitz (Stephan, 1986).⁴

Peran Pemerintah kota Surabaya menyatakan bahwa Aksi Gangster merupakan salah satu tantangan terbesar dan memang selalu menarik perhatian masyarakat maupun dalam instansi pemerintah kota. Dalam analisa peneliti, di karenakan aksi dari gangster tersebut sangat membuat masyarakat menjadi takut resah, karna sering teriadi gangguan-gangguan dari sekelompok gangster. Ketika sebuah aksi gangster hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika aksi dari gangster ini dalam sebuah wilayah terjadi berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan yang berkuasa di wilayah tersebut barulah aksi dari mereka mendapatkan perhatian. Kembali diulangi, pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal (politik kriminal), penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: (a) Penerapan hukum pidana (criminal law application); (b) Pencegahan tanpa penerapan hukum pidana (prevention without punishment); dan (c) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media) (Hoefnagels, 1969:56).

³ Ilham, "PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENCEGAHAN AKSI GENG MOTOR DIKECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR" (2015).

⁴ Eko Wahyudi Monika Karuniasari, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER," *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 3, no. 1 (2022): 1-7.



Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua jalur: jalur penal (hukum pidana) yang lebih berfokus pada tindakan represif, dan jalur non-penal (di luar hukum pidana) yang lebih berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi.⁵

Masyarakat juga kerap mendesak pemerintah untuk bisa terus terjun dan memberikan kebijakan terkait permasalahan gangster yang kian membahayakan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat merasa bahwa gangster sangat mengancam dan memberikan permasalahan yang kian berbahaya. Ancaman ini datang dari para anggota gangster yang kerap kali melakukan rusuh dan membawa senjata tajam yang mana Masyarakat tentu tidak bisa melawan dengan mudah dan membentengi dirinya dari hal tersebut. Di Surabaya sendiri, hal ini sangat didukung penuh oleh pemerintah khususnya Bapak Walikota Surabaya.

Dalam beberapa kasus gangster yang pernah ada, Masyarakat bersama-sama melakukan pengamanan dengan melakukan penangkapan terhadap anggota gangster yang meresahkan. Mereka juga menyerahkan kepada polisi apabila didapati anggota gangster yang membawa senjata tajam. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pembinaan untuk anggota gangster yang memang bisa dibina, hal ini terlihat dari mereka-mereka yang dirasa tidak bermain senjata tajam dan memang berada dalam cakupan umur yang masih belia. Pembinaan ini tentu memuat program-program positif yang melibatkan anak-anak dan remaja untuk mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan negative.

Clinard dan Meier dalam buku Narwoko dan Suyanto membedakan empat sudut pandang pengertian tentang perilaku menyimpang (deviance behavior) di kalangan remaja. Pertama dari sudut pandang secara statistik adalah perilaku yang jarang atau tidak sering dilakukan. Kedua, pandangan secara absolu tatau mutlak, disebutkan

bahwa masyarakat menetapkan aturan secara jelas dan warga masyarakatnya harus setuju apa yang disebut sebagai tindakan menyimpang atau tidak. Ketiga, pandangan reaktif. Berkaitan dengan reaksi atau respon masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku individu. Keempat, pandangan secara normatif, bahwa penyimpangan itu adalah pelanggaran atau bertentangan terhadap norma sosial. Apa yang dimaksudkan dengan masalah sosial? Secara umumnya, masalah sosial boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang mengancam atau dilihat sebagai mengancam kepentingan seseorang individu (Coleman & Cressey, 1999). Namun demikian, definisi ini dianggap tidak begitu tepat kerana terdapat beberapa keadaan yang mungkin merupakan masalah sosial kepada setengah orang, sebaliknya merupakan penyelesaian kepada orang lain. Selain itu, masalah sosial sering dianggap sebagai situasi sosial yang dilihat oleh ramai orang sebagai tidak sesuai dan perlu dibaiki perbetulkan (Eitzen & Zini.1, 1997).Justeru, terdapat definisi sosiologikal tentang masalah sosial iaitu pertama, masalah sosial muncul 1 terjadi apabila terdapat perbezaan antara apa yang ideal dalam masyarakat dengan pencapaian sebenar (Merton, 1976).⁶ Ini boleh dilihat misalnya apabila berlaku diskriminasi ras iaitu terdapat segelintir masyarakat yang dinafikan peluangnya terhadap pendidikan, pekerjaan dan perumahan, walaupun Masyarakat sendiri menganggap bahawa ia sepatutnya menerima layanan yang adil dan saksama seperti mana individu yang lain. Pendekatan yang pertama ini dikritik kerana tiada sebuah masyarakat pun yang memiliki nilai dan idealnya yang tersendiri. Ini kerana nilai dan ideal dalam masyarakat tersebut adalah berasaskan pendapat pengkaji itu sendiri dan bukannya melalui analisis yang objektif. Kedua, sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial apabila terdapat sebilangan orang yang mempercayai bahawa keadaan tersebut merupakan suatu masalah (Blumer, 1971). Ini merujuk kepada "pendapat umum" dan bukannya ahli Sosiologi itu sendiri yang membuat keputusan sama ada ia masalah sosial atau tidak. Pendekatan ini juga dikritik kerana

⁵ Suwendri Ni Made and Sukiani Ni Ketut, "Penyimpangan Perilaku Remaja Di Perkotaan," *KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya* 4, no. 2 (2020): 51–59.

⁶ Zakiah Jamaluddin, "Masalah Sosial Remaja: Tinjauan Daripada Perspektif Sosiologi," *Dimensi-dimensi Pembangunan Sosial* (2001): 117–124, <http://repo.uum.edu.my/id/eprint/1285>.



masyarakat seringkali tidak memahami sepenuhnya apa yang dikatakan "masalah" Namun demikian, kedua-dua definisi tentang masalah sosial ini diterima kerana dalam masa ahli Sosiologi itu membuat penilaian, pandangan masyarakat turut diambil kira. Proses pembentukan geng bagi tiap individu memiliki asal mula yang berbeda-beda, mungkin unik, sesuai dengan karakter, kepribadian dan perasaan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Individu-individu yang kolektif tersebut membentuk geng tersebut bermaksud untuk mencari kebahagiaan dan mendapat teman yang pasti. Kebahagiaan yang mereka rasakan itu, maka anggota geng dapat mempererat pertemanan, persatuan, dan bertahan di dalam geng-nya. Walaupun cara-cara yang salah dan menyimpang dari norma, mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan mencari kesenangan dan kebahagiaan (Sari, 2014).

Seseorang berperilaku menyimpang karena dipengaruhi oleh mengendurnya pengawasan serta pengendalian sosial. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap kemerosotan moral, sehingga individu sukar untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma. Perubahan norma yang terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami perkembangan dari masyarakat yang sederhana menuju ke masyarakat yang modern. Kondisi demikian mendorong sifat individualisme yang cenderung ingin melepaskan diri dari kendali sosial, serta merosotnya norma-norma umum. Mengendurnya norma-norma umum kelompok menjadi terpisah-pisah, sehingga tindakan-tindakan serta harapan-harapan bertentangan dengan harapan orang lain. Selanjutnya sistem dalam masyarakat runtuh dan masyarakat dalam kondisi anomi. Bila keadaan anomi tersebut dihadapi oleh anak dan remaja akibatnya akan menimbulkan gejala-gejala perilaku penyimpangan. Bahkan cenderung ke perilaku kriminal. Hal tersebut nampak dalam perilaku geng motor yang

seringkali menggunakan kekerasan dalam kegiatan mereka (Sambas, 2011). Menyikapi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor. Terdapat hubungan yang sangat erat antara lemahnya ikatan seseorang dengan orang tua, lingkungan pendidikan dengan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan para remaja yang merupakan gangster.

Pemerintah Surabaya sendiri kerap menyokong Masyarakat Surabaya untuk bisa memberikan kenyamanan sehingga hal-hal seperti ini bisa terus berkurang seiring berjalannya waktu. Sehingga antara satu sama lain baik masyarakat biasa hingga ormas yang ada berada dalam satu jalan yang sama dan tidak ada aksi-aksi yang akan menimbulkan pertikaian satu sama lain. Meskipun begitu, Masyarakat tetap menunjung tinggi hukum dengan menyerahkan anggota gangster yang memang kerap kali tertangkap meskipun telah dilakukan pembinaan kepada pihak kepolisian. Hal ini dilakukan agar mereka bisa jera dan merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya menimbulkan risiko yang besar.⁷

Pemerintah, menyadari peran pentingnya, telah mengambil berbagai langkah, termasuk operasi patroli rutin bersama TNI dan Polri, pembinaan remaja melalui program-program positif, serta kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Salah satu contohnya adalah, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang ikut terjun memimpin operasi yang melibatkan ribuan personel untuk meningkatkan keamanan di kota. Keterlibatan ini tentu juga akan membuat pemerintah merasakan bahwa hal ini sudah sangat genting untuk ditindak lanjuti mengingat bahwa banyak ancaman dan bahaya yang berkeliaran bebas di jalanan.

Meskipun demikian, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Seperti pembinaan yang dilakukan Masyarakat Surabaya, tentu diperlukan Kerjasama antara pemerintah dan Masyarakat untuk bisa membangun suasana lingkungan yang nyaman dan aman. Pemerintah juga turut mengajak

⁷ Nandang Sambas, "Penanggulangan Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Geng Motor Oleh Kepolisian

Di Wilayah Bandung," *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 225–232.



masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah, keluarga, dan sekolah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak

Dengan demikian, penanggulangan gangster di perkotaan tidak hanya terfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua warga. Diharapkan fenomena gangster dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua warga.

Upaya Pembinaan dan Penemuan Solusi Keberlanjutan Pada Gangster di Perkotaan

Berbicara tentang gangster di perkotaan, penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Hasil dari wawancara kami Muhammad Husni dari Tim Jati Suro Pos Pengamanan Dupa Demak Satpol Kota memberikan keterangan bahwa kerja sama antar lembaga pemerintah terjadi untuk mengurus masalah gangster seperti ini. "Kerja sama yg terjadi dari Semua pihak ya mulai dari jajaran samping Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun linmas damkar, bpbd maupun polisi itu sendiri maupun dinas dinas yang lainnya yang dimana dari dinas manapun memberikan kita kerja sama satu sama lain untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk masyarakat. Apabila malam mungkin tidur karena gara gara ada geser tidak bisa apa tidak bisa tenang kita mengamankan baik itu pagi maupun malam. yang diutamakan karena kita memberikan kenyamanan dan keamanan untuk masa ke masyarakat Surabaya. Bagaimana pun caranya baik kita akan

melakukan kerja sama dengan jajaran terkait." imbuhnya.

Upaya penanganan yang dilakukan setelah penangkapan ialah pembinaan Melalui pendekatan secara persuasif dan humanis, melalui pendekatan ini di harapkan dapat lebih menyentuh hati para pelakunya. Pembinaan dan penemuan solusi keberlanjutan pada gangster di perkotaan merupakan isu penting untuk mempromosikan keamanan dan ketertiban di lingkungan perkotaan. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini meliputi: (a) Pendekatan Pendidikan dan Pembinaan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada genster tentang konsekuensi tindakan mereka, serta menyediakan program pembinaan agar mereka dapat beralih ke jalur yang lebih positif. (b) Penyediaan Alternatif Pekerjaan: Membantu genster untuk menemukan pekerjaan yang legal dan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki sehingga mereka bisa meninggalkan aktivitas kriminal. (c) Kolaborasi dengan Pihak Berwenang: Bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap genster dan memberikan tekanan hukum bagi pelanggaran yang dilakukan. (d) Program Rehabilitasi: Mengembangkan program rehabilitasi bagi genster yang terlibat dalam kegiatan kriminal, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka. (e) Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan dengan melibatkan mereka dalam pengawasan lingkungan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Informan juga menambahkan keterangan bentuk kerja sama yang terjadi selain dari pada pemerintah, masyarakat juga turut serta membantu untuk menertibkan adanya gangster, "Kebetulan alhamdulillah dari bonek juga ikut bergabung. Dari ormas juga bergabung bergabung untuk mengamankan kenyamanan bagi warga Kota Surabaya. Jadi mereka karena kita juga arek arek suroboyo dan bapak wali kota pun juga apa secara tidak buat tidak langsung juga menyokong arek arek suroboyo jadi memberikan dari bapak sendiri juga memberikan semangat pada area suroboyo untuk Surabaya itu sendiri memberikan kenyamanan. Jadi tidak satu satu madu di jalan samping terkait dinas



ormas dan ada yang dari bonek juga ada ikut”

Penanganan masalah gangsterisme di Surabaya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perilaku anak pelajar yang terlibat dalam tindak kejahatan. Perilaku ini tidak hanya menambah beban bagi pemerintah, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Salah satu masalah utama adalah fenomena kelompok pelajar yang terlibat dalam tindak kejahatan secara berkelompok. Aktivitas ini sering meliputi tawuran antarsekolah, perusakan properti, dan kekerasan fisik. Tawuran pelajar, misalnya, dapat menimbulkan kerusakan fisik pada siswa dan menciptakan lingkungan yang tidak aman di sekitar sekolah. Selain itu, tindakan kekerasan ini dapat menyebar ke kalangan pelajar lainnya, membentuk pola perilaku yang destruktif dan sulit diatasi.

Perilaku anak pelajar yang melanggar hak orang lain, seperti pemerasan dan bullying, juga menjadi masalah serius. Tindakan-tindakan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga merusak keharmonisan sosial di masyarakat. Korban bullying atau pemerasan mungkin mengalami trauma emosional dan penurunan kepercayaan diri, yang pada akhirnya dapat mengganggu prestasi akademis mereka dan menciptakan ketegangan dalam komunitas sekolah.

Masalah lain adalah ketidaktaatan terhadap peraturan hukum. Banyak pelajar yang terlibat dalam kejahatan tampaknya tidak memahami atau tidak mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan pemahaman hukum di kalangan pelajar. Pendidikan hukum di sekolah perlu diperkuat untuk membantu pelajar memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan pentingnya mematuhi peraturan.

Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap tindak kejahatan yang melibatkan pelajar, sambil juga mengedepankan pendekatan pencegahan.

Program-program pendidikan tentang hukum dan etika di sekolah dapat membantu pelajar memahami dampak dari tindakan mereka dan pentingnya mematuhi peraturan.

Program intervensi dini juga penting untuk mengidentifikasi pelajar yang berisiko terlibat dalam kejahatan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Konseling, bimbingan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif dapat membantu mengalihkan perhatian mereka dari aktivitas yang merugikan dan memberikan alternatif yang lebih konstruktif.

Secara keseluruhan, penanganan masalah gangsterisme yang melibatkan pelajar di Kota Surabaya memerlukan upaya yang terintegrasi, melibatkan penegakan hukum yang tegas serta upaya pencegahan dan edukasi yang efektif. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara berbagai pihak, tantangan ini dapat diatasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi muda.

Menurut pandangan para ahli hukum dan kriminologi Wahyu Mulyono mengemukakan bahwasannya” mengamati dan memahami kejahatan tidaklah mudah. Kejahatan merupakan sebuah fenomena sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut yang berbeda”. Adapun menurut topo santoso mengemukakan bahwasannya usaha memahami kejahatan itu telah berabad-abad yang lalu dikerjakan oleh ilmuan terkenal yaitu plato yang menyatakan dalam bukunya” republik” bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.⁸ Aristoteles mengatakan bahwasannya kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Dalam literatur sosiologi yang diungkapkan oleh Paul B. Horton (1996),⁸ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani deviasi sosial. Pertama, internalisasi nilai-nilai sosial melalui sosialisasi, baik melalui kelompok informal maupun formal seperti keluarga dan sekolah. Keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk, menanamkan, dan mengarahkan norma-norma sosial pada remaja.

⁸ Nursalam, “Perilaku Komunitas Begal Remaja (Studi Faktor Dan Upaya Penanggulangan Pemerintah Di Kota Makassar),” *Jurnal Etika Demokrasi Pendidikan*

Pancasila dan Kewarganegaraan III, no. 1 (2018): 63–74, www.unismuh.ac.id.



Sosialisasi informal dalam keluarga sering kali lebih efektif karena adanya kedekatan emosional antara orang tua dan anak.

Kedua, penerapan hukum pidana oleh negara melalui penegakan hukum yang formal, seperti polisi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Meskipun penangkapan dan hukuman bisa memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, ada risiko membatasi kebebasan kelompok lain yang tidak terlibat dalam kejahatan, seperti komunitas pengendara motor yang bertujuan positif.

Ketiga, dekriminialisasi, yaitu pengakuan legal terhadap eksistensi kelompok seperti geng motor, tanpa melegitimasi tindakan kriminal. Tujuannya adalah mengelola perilaku remaja dengan menyediakan ruang publik, seperti arena balap, agar mereka dapat mengekspresikan diri secara legal dan aman. Tindakan responsif terhadap keberadaan geng motor sebaiknya tidak dilakukan dengan sikap moralistis yang berlebihan, karena hal itu justru dapat menimbulkan resistensi di kalangan remaja. Maraknya kejahatan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia, sama halnya di Kota Surabaya. Pemerintah dalam hal menangani gengster di Kota Surabaya telah melakukan upaya berupa Penguatan dalam hal pengawasan penjagaan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang dimana melibatkan unsur TNI dan POLRI. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok dari kepolisian adalah memelihara serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dan sesuai dengan UUD Nomor 34 tahun 2004 yang berisi tugas TNI Pasal 7 Ayat 1 adalah menegakkan kedaulatan negara, serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.⁹

Dalam keterangannya informan juga mengatakan proses penangkapan gangster sesuai prosedur “contoh kemarin di kenjeran yang kena berapa orang itu ada yang 20 orang itu kena 20 orang. Dan setelah kita kena 20 orang kita memberikan

pembinaan. Kalau memang ada senjata tajam kita serahkan ke kepolisian karena undang undangnya di kepolisian. Tapi dilihat dulu umurnya berapa? Kalau memang dilihat umurnya kita lihat dari kepolisian, tak terkecuali tidak ada senjata tajam baru kita ada pembinaan aja.” Pemerintah dalam hal ini memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pemeliharaan dan pembinaan terhadap anak pelajar, termasuk anak pelajar dibawah umur. terkait dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 sendiri menjelaskan bahwasannya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disinilah *Collaborative Government* peranannya sangatlah penting mulai dari Peran Orang Tua, Guru di Sekolah, dan pemerintah bagi mereka seorang pelajar namun yang utama adalah bimbingan dari orang tua serta guru pendidik agar anak-anak tidak salah arah dalam memilih pergaulan, karena baik didalam masyarakat atau lingkup keluarga banyak sekali pengaruh yang bersifat negatif yang bisa menyasarkan masa depan anak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma. Orang tua harus membentuk karakter dan akhlak baik anaknya dari dalam lingkup rumah dan keluarga. Terlepas anak berada diluar rumah anak-anak wajib mendapatkan Pendidikan formal yang berasal dari Lembaga Pendidikan yakni sekolah maka dari itu rumah kedua untuk anak-anak guna memperoleh ilmu tambahan adalah sekolah.¹⁰

Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting dalam upaya mencegah kenakalan remaja. Orang tua perlu bersikap terbuka dan empatik dalam membicarakan masalah yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Dengan komunikasi yang terbuka, orang tua dapat menjelaskan kepada anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku melanggar hukum serta membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Selain komunikasi, pengawasan terhadap kegiatan anak juga krusial. Pengawasan yang ketat dapat membatasi akses anak ke

⁹ Nyi Irmayani, “Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor,” *Sosio Informa* 4, no. 2 (2018).

¹⁰ Muhammad Jufri, “Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan

Remaja Di Kota Palu,” *e-Jurnal Katalogis* 3, no. 12 (2015): 76–84.



lingkungan yang berisiko memicu kenakalan. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan yang positif dan memperkuat pengawasan terhadap pergaulannya.¹¹

Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, seperti membantu mereka membuat keputusan yang bijaksana dan memberikan perhatian yang cukup, juga memainkan peran penting dalam mencegah kenakalan remaja, terutama yang berhubungan dengan geng motor. Keterlibatan ini bisa memperkuat nilai-nilai positif dan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial yang baik.

Lingkungan sosial juga berperan dalam mempengaruhi kenakalan remaja. Orang tua harus memperhatikan lingkungan di sekitar anak-anak dan mengenal teman-teman mereka. Mendukung anak-anak untuk bergaul dengan kelompok yang positif dan menjauhkan mereka dari kelompok yang berpotensi memicu kenakalan remaja sangatlah penting. Jaringan pendukung yang kuat, seperti keluarga yang positif dan komunitas yang peduli, dapat mengurangi risiko anak terlibat dalam kenakalan remaja.

Namun, dalam menjalankan perannya, orang tua sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti masalah ekonomi, kesibukan kerja, kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam pengasuhan, serta konflik dalam hubungan orang tua. Oleh karena itu, dukungan dan sumber daya yang memadai sangat dibutuhkan agar orang tua bisa menjalankan peran mereka dengan lebih efektif.

Pendidikan dan penanaman nilai-nilai budaya memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh geng di perkotaan. Geng-geng di lingkungan perkotaan sering kali menjadi tempat bagi individu yang merasa terasing, tidak memiliki arah, atau kurangnya dukungan sosial, sehingga mereka bergabung dengan kelompok tersebut untuk mencari identitas, rasa aman, dan dukungan sosial.

Namun, dengan adanya pendidikan yang kuat dan penanaman nilai-nilai budaya yang baik, potensi remaja untuk terjerumus ke dalam aktivitas geng dapat berkurang secara signifikan.¹²

Pendidikan yang diberikan di sekolah tidak hanya harus menekankan pada aspek kognitif atau akademis saja, tetapi juga pada pengembangan karakter dan pemahaman nilai-nilai sosial. Pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan rasa hormat terhadap sesama sangatlah penting dalam membentuk kepribadian remaja yang kuat dan mandiri. Ketika siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai tersebut, mereka cenderung lebih bijaksana dalam memilih pergaulan dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif, seperti geng yang melibatkan diri dalam tindakan kriminal.

Selain itu, penanaman nilai-nilai budaya lokal juga sangat penting. Di Indonesia, misalnya, nilai-nilai budaya seperti gotong royong, kebersamaan, dan toleransi sudah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai ini di kalangan remaja melalui pendidikan formal dan informal, sekolah dapat memperkuat identitas kultural siswa yang pada akhirnya dapat mencegah mereka dari perilaku menyimpang. Ketika siswa memiliki akar budaya yang kuat, mereka cenderung lebih menghargai sesama, menjaga hubungan sosial yang baik, dan memiliki kontrol diri yang lebih baik dalam menghadapi tekanan atau tantangan sosial.

Penanaman nilai-nilai budaya juga bisa dilakukan melalui program-program ekstrakurikuler, seperti seni budaya, olahraga, dan kegiatan sosial. Program-program ini tidak hanya memberi kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan diri, tetapi juga untuk belajar bekerja sama dan saling menghormati dalam konteks yang positif. Misalnya, melalui kegiatan seni tradisional atau pertunjukan budaya, siswa dapat belajar menghargai warisan budaya mereka serta memahami pentingnya

¹¹ Shavira Uswatun Kasanah and Rully Andi Yaksa, "Efektivitas Peran Orangtua Dalam Keluarga (Studi Kasus Geng Motor Di Kota Jambi)," *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 994–999.

¹² Eko Yuliyanto, "Ancaman Geng Sekolah Di Yogyakarta: Bagaimana Solusinya?," *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 7, no. 01 (2022): 22–30.



menjaga identitas budaya yang positif. Dalam konteks ini, siswa yang terlibat dalam kegiatan positif cenderung memiliki penyaluran energi dan bakat yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kegiatan produktif di luar sekolah.

Pendidikan dan penanaman nilai-nilai budaya juga harus melibatkan keluarga dan komunitas. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan informal di rumah. Mereka perlu menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai budaya dan mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah, sangat membantu dalam mencegah anak-anak terjerumus dalam pergaulan yang negatif.

Komunitas juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dan remaja. Dukungan dari tokoh masyarakat, pemuka agama, serta lembaga-lembaga sosial dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas geng dan memberi alternatif kegiatan yang lebih bermanfaat bagi remaja di lingkungan perkotaan. Sebagai contoh, pengembangan program-program bimbingan dan konseling di sekolah, dukungan terhadap kegiatan komunitas, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan anak-anak muda dapat menjadi sarana yang efektif dalam mengurangi daya tarik geng bagi remaja.

Dengan adanya sinergi antara pendidikan di sekolah, penanaman nilai-nilai budaya di rumah, dan dukungan dari masyarakat, upaya untuk meminimalisir kejahatan geng di perkotaan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Geng sering kali terbentuk sebagai respons terhadap ketidakmampuan individu atau kelompok untuk menemukan tempat mereka dalam masyarakat. Dengan membekali remaja dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang baik, kita dapat membantu mereka menemukan jalan yang lebih positif dan konstruktif untuk menjalani hidup

di tengah dinamika perkotaan yang kompleks.

Oleh karena itu, pendidikan dan penanaman nilai-nilai budaya bukan hanya upaya untuk mencegah geng, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, damai, dan harmonis. Generasi muda yang dibekali dengan pendidikan dan nilai-nilai budaya yang baik akan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya menghargai diri sendiri, tetapi juga memiliki kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar mereka.

Pemerintah semestinya memiliki program untuk menangani tindak kejahatan yang terjadi termasuk aksi gangster yang merebak di masyarakat kota Surabaya. Apa yang terjadi di kota Jakarta dan kota besar lain yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi setidaknya menjadi contoh bagi pemerintah kita untuk segera mengambil tindakan hukum walaupun setidaknya ada upaya untuk mencegah potensi-potensi yang bisa berubah di kemudian hari menjadi kegaduhan dalam aksi kriminalitas sosial dalam masyarakat. Selain itu penulis juga menemukan adanya jalinan kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak kepolisian untuk bahu membahu menangani kasus gangster ini.¹³

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dan peran negara dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi tindak kejahatan, termasuk aksi gangster, menjadi sangat krusial. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti ketimpangan ekonomi dan urbanisasi yang pesat, menuntut adanya kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama-tama, kebijakan yang dirumuskan harus melibatkan berbagai pihak terkait, tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga

¹³ Sambas, "Penanggulangan Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Geng Motor Oleh Kepolisian Di Wilayah Bandung."



lembaga-lembaga lainnya, seperti dinas sosial, pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi penting guna memastikan bahwa masalah kriminalitas, seperti aktivitas gangster, tidak hanya diatasi melalui penegakan hukum, melainkan juga melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi sosial. Pendekatan holistik ini cenderung lebih efektif dalam jangka panjang karena penanganan yang hanya berfokus pada penindakan hukum sering kali tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan sosial yang memicu kejahatan.

Selanjutnya, pemerintah perlu mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi pemuda di lingkungan perkotaan. Gangsterisme sering kali muncul di masyarakat yang mengalami ketidakadilan sosial, pengangguran tinggi, serta akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, dengan menyediakan pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, dan akses pendidikan yang lebih baik, pemerintah dapat mengurangi daya tarik kelompok kriminal bagi remaja yang rentan. Program pemberdayaan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat komunitas secara keseluruhan, menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Penting bagi pemerintah untuk membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal. Peran masyarakat dalam pencegahan kriminalitas sangatlah krusial. Dengan mendukung inisiatif masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan, pemerintah dapat menciptakan sinergi positif antara warga, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Pemberdayaan komunitas mencakup peningkatan komunikasi antara pihak berwenang dan warga, sehingga permasalahan keamanan dapat diatasi secara lebih cepat dan efektif melalui pendekatan partisipatif.

Selain pendekatan sosial, pemanfaatan teknologi juga dapat memainkan peran penting

dalam mendukung kebijakan keamanan. Penggunaan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti kamera CCTV, pengawasan digital, dan aplikasi pelaporan masyarakat, dapat mempercepat proses deteksi dan respons terhadap ancaman keamanan. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam manajemen keamanan kota, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan menangani tindakan kriminal, termasuk aktivitas gangster yang terorganisir.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam menangani masalah keamanan, termasuk kejahatan gangster, tidak dapat bergantung pada penegakan hukum semata. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang mencakup pendekatan preventif dan rehabilitatif, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan. Dengan demikian, kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih aman, sejahtera, dan inklusif bagi seluruh warganya.

Kesimpulan

Gangsterisme di perkotaan merupakan masalah kompleks yang terus menjadi tantangan bagi pemerintah. Di balik aksi kekerasan dan intimidasi yang mereka lakukan, tersimpan akar permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang rumit. Pemerintah menghadapi dilema dalam mengatasi fenomena ini, di mana penindakan hukum saja tidak cukup. Pembinaan menjadi kunci penting dalam upaya menanggulangi gangsterisme. Program-program pembinaan yang komprehensif, menyentuh aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan psikologis, menjadi harapan untuk mengubah perilaku anggota geng dan membangun kemandirian mereka. Namun, pembinaan tidak berhenti di sana.

Solusi pasca pembinaan menjadi titik krusial dalam menentukan keberhasilan upaya ini. Mantan anggota geng membutuhkan reintegrasi sosial yang kuat, akses terhadap peluang ekonomi, dan dukungan psikologis untuk mencegah mereka kembali ke jalur kriminal.



Jurnal ini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dari pemerintah dalam menanggulangi gangsterisme. Kebijakan yang inklusif, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses dalam membangun lingkungan yang aman dan produktif. Pemerintah perlu fokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga.

Jurnal ini menjadi pengingat bahwa penanggulangan gangsterisme bukanlah tugas mudah. Namun, dengan komitmen dan strategi yang tepat, pemerintah dapat menciptakan perubahan nyata dan melepaskan generasi muda dari jerat geng.

Daftar Pustaka

- Astuti, Puji Ayu, Ismah Rustam, and Ahmad Mubarak Munir. "Analisis Kekerasan Gangster Di Haiti Dan Dampaknya Terhadap Arus Migrasi Menuju Amerika Serikat Tahun 2019-2021." *Indonesian Journal of Global Discourse* 4, no. 2 (2022): 53–72.
- Eko Yuliyanto. "Ancaman Geng Sekolah Di Yogyakarta: Bagaimana Solusinya?" *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 7, no. 01 (2022): 22–30.
- Ilham. "KEKERASAN DAN KRIMINALITAS DI PERKOTAAN: ANOMALI KOTA MAKASSAR MODERN PADA ABAD KE-20." *971-1216* 14, no. 2 (1963): 31–46.
- Ilham. "PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENCEGAHAN AKSI GENG MOTOR DIKECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR" (2015).
- Nyi Irmayani. "Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor." *Sosio Informa* 4, no. 2 (2018).
- Jamaluddin, Zakiah. "Masalah Sosial Remaja: Tinjauan Daripada Perspektif Sosiologi." *Dimensi-dimensi Pembangunan Sosial* (2001): 117–124.
<http://repo.uum.edu.my/id/eprint/1285>.
- Jufri, Muhammad. "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu." *e-Jurnal Katalogis* 3, no. 12 (2015): 76–84.
- Kasanah, Shavira Uswatun, and Rully Andi Yaksa. "Efektivitas Peran Orangtua Dalam Keluarga (Studi Kasus Geng Motor Di Kota Jambi)." *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 994–999.
- Monika Karuniasari, Eko Wahyudi. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER." *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 3, no. 1 (2022): 1–7.
- Ni Made, Suwendri, and Sukiani Ni Ketut. "Penyimpangan Perilaku Remaja Di Perkotaan." *KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya* 4, no. 2 (2020): 51–59.
- Nursalam. "Perilaku Komunitas Begal Remaja (Studi Faktor Dan Upaya Penanggulangan Pemerintah Di Kota Makassar)." *Jurnal Etika Demokrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* III, no. 1 (2018): 63–74.
www.unismuh.ac.id.
- Sambas, Nandang. "Penanggulangan Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Geng Motor Oleh Kepolisian Di Wilayah Bandung." *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 225–232.

